

Kondisi Data Saat Ini (2)

3

Perbedaan data geospasial antar instansi



Masih terdapat perbedaan luas wilayah untuk wilayah yang sama yang dihitung melalui spasial antar instansi

Jenis-jenis Statistik (UU No. 16 Tahun 1997, Pasal 5)

Statistik Dasar

Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri **lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.**



BPS

Statistik Sektoral

Statistik yang pemanfaatannya **untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu** dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



**Kementerian/Lembaga/
Dinas/Instansi**

Statistik Khusus

Statistik yang pemanfaatannya untuk **memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain** dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.



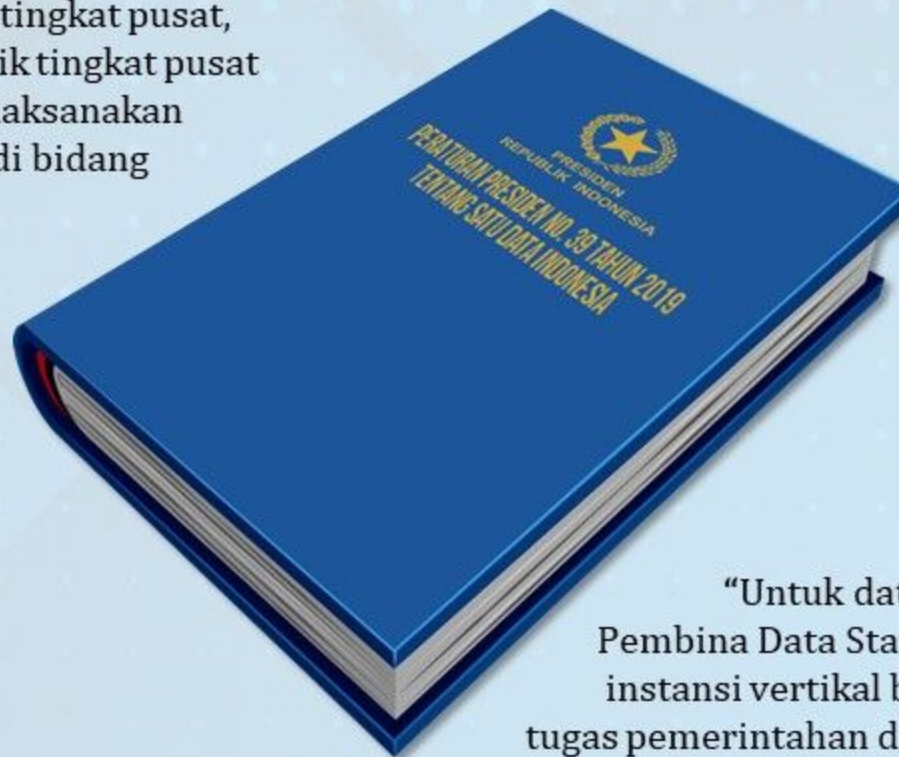
Swasta/Individu

BPS dalam UU No. 16 Tahun 1997, Pasal 31 & Perpres no. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

BPS adalah Pembina Data Statistik

Pasal 13 ayat 2

“Untuk data statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik”



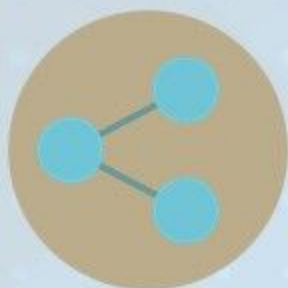
Pasal 20 ayat 2

“Untuk data statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik di provinsi atau kabupaten/kota”

Tugas Pembina Data



Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Menetapkan **struktur yang baku dan format baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I



Melakukan **pemeriksaan ulang** terhadap **data prioritas** (Perpres SDI pasal 13 ayat 1)



Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BPS merujuk *Generic Statistical Business Process Model*



BPS



GSBPM

Relevansi, Akurasi,
Koherensi, Aksesibilitas,
Interoperabilitas, Aktualitas
& Ketepatan Waktu



Proses bisnis statistik yang dilakukan BPS merujuk pada GSBPM yang ditetapkan oleh UNECE dan diadopsi oleh NSO di dunia

BPS memiliki *Advanced Release Calendar BRS*

“*ARC* merupakan bentuk janji **pemutakhiran informasi** dari BPS”



BPS Mengacu pada Konsep, Metode dan Klasifikasi Internasional



Kode referensi yang digunakan BPS dalam pengumpulan data merujuk pada standar internasional

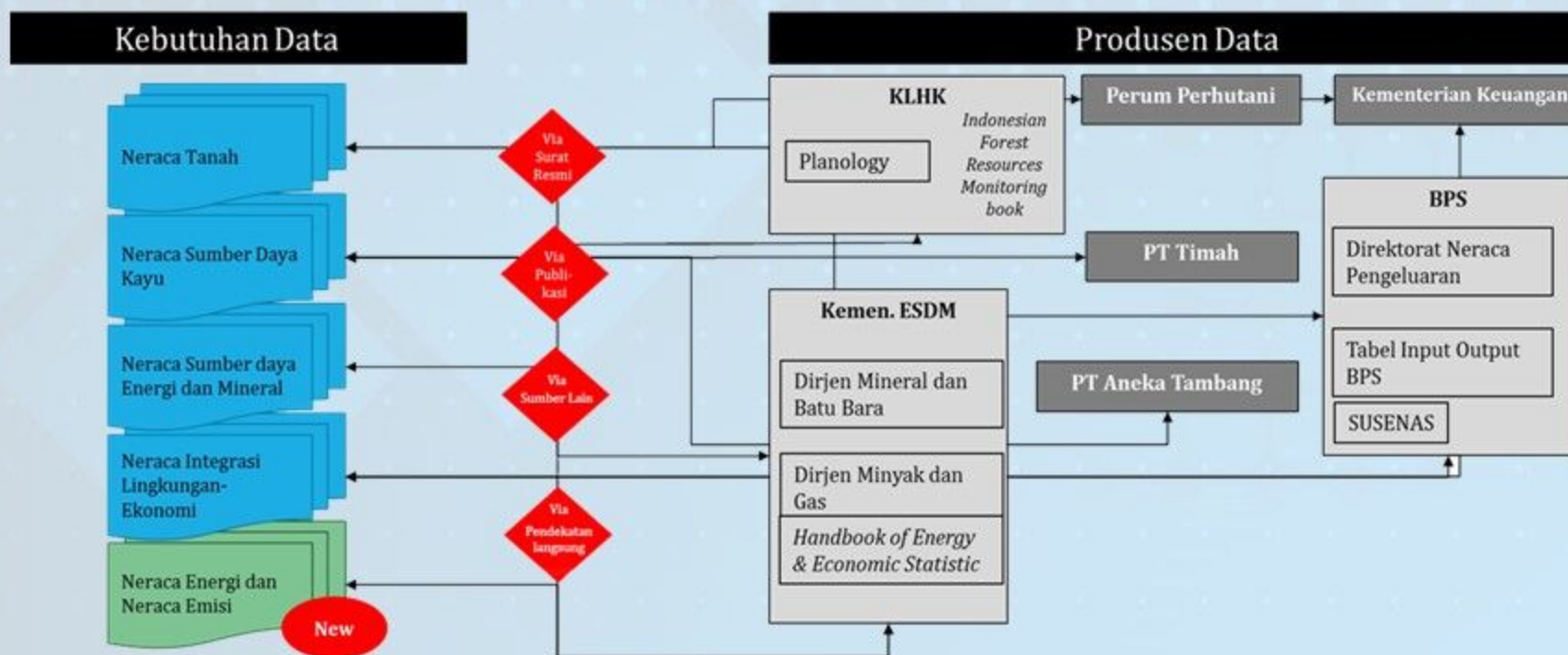
Upaya Implementasi SDI yang telah dilakukan BPS (1)

1

SISNERLING

Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan Terintegrasi

Data Flow – Data Exchange Process dari SISNERLING mengacu dan mengimplementasikan konsep-konsep yang terdapat dalam Satu Data Indonesia.



Upaya Implementasi SDI yang telah dilakukan BPS (2)

2

SIRuSa

Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

adalah suatu aplikasi berbasis website yang menyediakan informasi **metadata statistik** yang ada **di Indonesia**. **Metadata** merupakan salah satu prinsip SDI.



<https://sirusa.bps.go.id>

Upaya Implementasi SDI yang telah dilakukan BPS (3)

3

SIMDASI

Sistem Informasi Data Statistik Terintegrasi

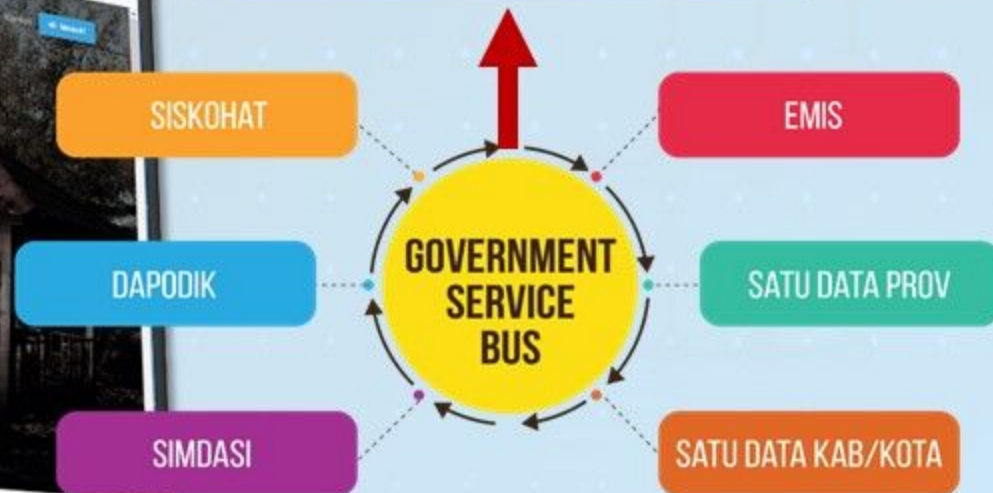
Data SIMDASI dapat menjadi salah satu sumber data bagi Portal Satu Data

Pasal 36 Ayat 5:

Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.



PORTAL SATU DATA



<https://simdasi.bps.go.id>

Upaya Implementasi SDI yang telah dilakukan BPS (4)

4

ROMANTIK Online

ROMANTIK *Online*

adalah suatu aplikasi berbasis website untuk pengajuan rancangan kegiatan statistik oleh Kementerian/Lembaga/OPD ke BPS. **Mengajukan rekomendasi ke Pembina Data** terdapat dalam **Perpres SDI Pasal 13 Ayat (1) c dan Pasal 20 Ayat (1) a**.

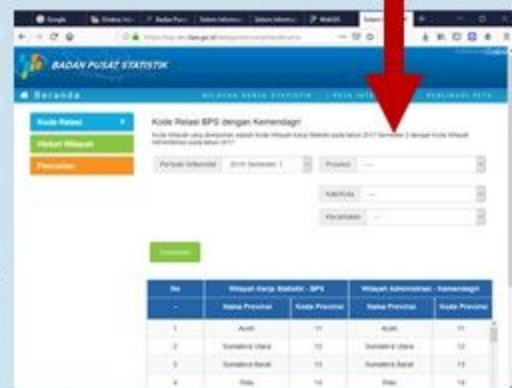


<https://romantik.bps.go.id>

5

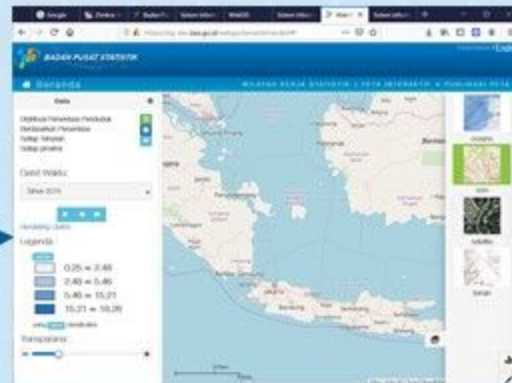
SIG Sistem Informasi Geografis

**Upaya BPS
mewujudkan Satu
Data Indonesia:
Perbedaan Kode
Referensi**



**Kode Relasi
BPS dengan
Kemendagri**

Peta Tematik Interaktif



<https://sig-dev.bps.go.id/>

Upaya BPS mewujudkan Satu Data Indonesia



Partisipasi Publik sebagai Masyarakat untuk Data Statistik yang Lebih Baik



Menjadi Responden

Mau menjadi responden dan memberikan datanya apabila diminta



Aktif Melaporkan Data Diri

Peningkatan kualitas data registrasi dapat diperoleh jika masyarakat aktif melaporkan perubahan data kepada dinas terkait



Memberi Umpan Balik

Memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap data statistik yang telah digunakan baik untuk Pendidikan/penelitian/pembangunan



Sensus Online SP2020

Aktif *meng-update* data diri dalam Sensus Online SP2020 nanti

Partisipasi Publik sebagai Pemerintah untuk Data Statistik yang Lebih Baik



Konsisten terhadap
tata kelola data
pemerintah yang
telah **disepakati**
dalam SDI



Meningkatkan
kolaborasi aktif
antar K/L/D/I
dalam upaya
perwujudan SDI



Menerapkan standar
data yang telah
ditetapkan untuk
menghasilkan data
yang **berkualitas**



#SENSUSBENTARLAGI
#SP2020
#MENCATATINDONESIA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Sensus
Penduduk
2020**

"Anda Tercatat Data Akurat"

**Pelopori
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua**

Terima Kasih

www.sumbar.bps.go.id



Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang



BPS Provinsi Sumatera Barat



(0751) 442158, 442159



@BPS_Sumbar



bps1300@bps.go.id



BPS Provinsi Sumatera Barat



BADAN PUSAT STATISTIK



Sensus
Penduduk
2020

SATU DATA UNTUK KEBIJAKAN TEPAT SASARAN



Ichsan, SST

Kepala Bidang Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat



// Data Adalah Jenis Kekayaan Baru Bangsa Kita. Kini Data Lebih Berharga Dari Minyak. Oleh Karena Itu, Kedaulatan Data Harus Diwujudkan. Hak Warga Negara Atas Data Pribadi Harus Dilindungi. Regulasinya Harus Segera Disiapkan, Tidak Boleh Ada Kompromi.

(Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, 16 Agustus 2019)

Ir.Joko Widodo
Presiden RI



**SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU**

#74THINDONESIA #INDONESIAMAJU #SDMUNGGUL #PIDATOPRESIDEN2019

Kondisi Data Saat Ini (1)

1 Sulitnya mencari data pemerintah

- Banyak data sektoral yang dipegang oleh individu
- Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data sektoral
- Format data yang dibagikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG, PDF)

2 Perbedaan data statistik antar instansi

Terdapat perbedaan konsep dan definisi tanpa adanya metadata

BPS dan Kemendagri menggunakan konsep penduduk yang berbeda. BPS menggunakan konsep penduduk “de facto” sementara Kemendagri menggunakan konsep penduduk “de jure”. Hal ini mengakibatkan perbedaan angka jumlah penduduk yang dihasilkan oleh BPS dan Kemendagri.

Tidak adanya kode referensi

BPS dan Kemendagri menggunakan kode wilayah yang berbeda.

Wilayah	BPS	Kemendagri
Kepulauan Seribu	3101	3101
Jakarta Selatan	3171	3174
Jakarta Timur	3172	3175
Jakarta Pusat	3173	3171
Jakarta Barat	3174	3173
Jakarta Utara	3175	3172

Sumber : sig-dev.bps.go.id

